

SEKOLAH BERWAWASAN GENDER

*Dwi Edi Wibowo**

Abstract. School is an institution that plays an important role to change the mindset of students, including behaviors that are considered gender bias. Therefore, gender-oriented school that holds a strategic role and function in preparing students for multi intelegensianya to develop optimally without constrained by social values that sometimes gender-biased culture. The process of learning in the classroom that have not been entirely Encouraging active participation Between boys and girls equally, physical school environment that does not answer the specific needs of boys and girls as well as materials teaching materials in general, gender bias, the more clear that face education we do still need to be polished with a gender-responsive approach.

Kata Kunci : Responsif Gender, Pembelajaran dan Peserta didik

PENDAHULUAN

Secara nasional, penduduk laki-laki dan perempuan sudah memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan, misalnya: anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil jika dalam era global ini menomorduakan pendidikan bagi perempuan, apalagi jika anak perempuan mempunyai kecerdasan dan kemampuan (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita : 1998). Namun demikian kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah, terkait dengan bidang pendidikan ini. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang responsif gender perlu mendapatkan perhatian utama untuk mengatasi problem tersebut.

Sebenarnya— dalam bidang apapun termasuk pendidikan—belum terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi salah satunya oleh budaya patriarkhi yang sudah mengejawantah dalam pola pikir masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dipertegas oleh Khoffifah Indar Parawansa (2002 : xi), bahwa beberapa hal yang mempengaruhi belum terwujudnya keserasian jender antara lain, masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang patriakis. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Di samping itu, ketidaktepatan pemahaman ajaran agama seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Mansour Fakih (1999:9) menyatakan bahwa sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Lebih lanjut, Muhadjir M. Darwin (2005: 40-41 dan 55) dalam bukunya yang berjudul “Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa perempuan Indonesia belum terbebas

*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Admadjaya Yogyakarta.

dari masalah ketimpangan gender dan nilai-nilai patriarki sebenarnya memiliki akar yang sangat kuat dalam kebudayaan Indonesia.

Masih dalam wacana di atas, oleh karena itu untuk membongkar realitas budaya yang mengakar tersebut diperlukan sarana yang efektif, yang dalam hal ini adalah melalui pendidikan. Asumsinya adalah, pendidikan merupakan kunci utama dalam rangka *transfer of knowledge, transfer of behaviour* bahkan *transfer of culture*, bagi peserta didik. Sehingga— dalam konteks kajian ini—ketika yang disampaikan kepada anak didik *bias* gender maka pola pikir yang terbentuk pada peserta didik juga akan *bias* gender, begitu pula sebaliknya.

PEMBAHASAN

A. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatan.

Kesetaraan gender pada hakekatnya berarti mengakui bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan (Unesco, 2002).

Manifestasi ketidakadilan gender bermacam-macam, secara garis besar ketidakadilan gender termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda.

1. Marginalisasi

Proses marginalisasi (pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat dalam negara berkembang. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender (Bunga Rampai, 2001, 52-62). Beberapa contoh bentuk marginalisasi antara lain, promosi jabatan, biasanya diprioritaskan untuk laki-laki karena keyakinan pimpinan laki-laki lebih hebat dibandingkan perempuan, pelatihan teknologi diprioritaskan untuk laki-laki sehingga perempuan secara ekonomi semakin terpinggirkan. Karena pendidikan perempuan rendah, maka pekerjaan yang bisa dia ambil adalah sektor pekerjaan subsisten dengan upah yang rendah.

2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan di berbagai kehidupan (Bunga Rampai, 2001, 52-62). Istilah subordinasi ini mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi perempuan berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Kemampuan perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi perannya hanya peran domestik dan pemeliharaan anak –jenis pekerjaan yang tidak mendatangkan penghasilan yang secara berangsur-angsur menggiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan.

Beberapa contoh bentuk sub-ordinasi di masyarakat antara lain: *pertama*, perempuan dianggap konco wingking, di Jawa masyarakat memprioritaskan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan; *kedua*, perempuan dianggap lebih cocok pada bidang pekerjaan tertentu dan dipandang tidak cocok untuk pekerjaan yang lain, sedangkan laki-laki lebih bebas memilih jenis pekerjaan ketimbang perempuan.

3. Stereotype

Pelabelan atau stereotype yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotype yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan salah satu jenis kelamin tertentu (Bunga Rampai, 2001, 52-62). Stereotype adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empirik yang ada. Pemikiran stereotype tentang ciri-ciri laki-laki dan perempuan biasanya dikaitkan dengan peran gender mereka. Citra baku yang ada pada laki-laki adalah kecakapan, keberanian, pantang menangis, agresif dan peran gender mereka yaitu pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga. Citra baku yang ada pada perempuan adalah memiliki rasa kasih sayang, kemampuannya mengasuh, kehangatan, lembut, pemalu, cengeng.

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemukulan, pemerkosaan, pemukulan tetapi juga bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga terjadi emosional perempuan atau laki-laki yang mengalami akan terusik batinnya (Mansour Fakhir 1999: 17-20).

5. Beban kerja

Sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalani oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan menunjukkan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, selain bekerja di wilayah publik mereka masih juga harus mengerjakan pekerjaan domestik (Bunga Rampai, 2001, 52-62)

B. Sekolah Berwawasan Gender

Manajemen sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung upaya untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan gender. Sistem manajemen pendidikan di sekolah pada umumnya kurang memperhitungkan aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, serta dalam evaluasinya. Hal ini dapat dilihat dari peran dan peraturan yang seringkali tidak mencakup aksi dan sanksi yang terkait dengan masalah-masalah hubungan gender seperti pelecehan seksual, ejekan (*bullying*) atau perlakuan tidak senonoh terhadap perempuan yang mempengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, sebagian besar sekolah kurang sensitif terhadap pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak perempuan seperti kebutuhan fasilitas ruang khusus bagi anak perempuan pada waktu mereka sedang mendapatkan menstruasi, ketersediaan air, tempat sampah, pembalut wanita, dan sebagainya.

Selain pemenuhan kebutuhan sebagaimana telah di sebutkan di atas, perlu diupayakan adanya penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender. Yang di maksud anggaran sekolah responsif gender adalah upaya yang dilakukan sekolah untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga belajar dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. Anggaran sekolah berwawasan gender

merupakan anggaran yang disusun dan di syahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender. Anggaran yang responsif gender bukan anggran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki. Dalam konteks sekolah dalam hal ini berhubungan dengan pendidikan, anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Karena itu diperlukan adanya kerangka pendanaan dalam menjawab isu gender.

Memasukkan perpspektif gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah bukanlah pekerjaan mudah, karena berbenturan dengan berbagai kepentingan, nilai maupun keyakinan seseorang / sekelompok 'orang yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Secara garis besar ada 4 faktor yang memberi kontribusi cukup kuat terhadap terintegrasinya perspektif gender dalam pendidikan di sekolah.

Pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di sekolah, SDM tersebut tidak bekerja dalam ruang yang vakum, tetapi berinteraksi secara terus menerus dengan faktor-faktor di luar dirinya, sehingga membentuk keyakinan tentang penting tidaknya memasukkan gender sebagai arus utama pada kebijakan pendidikan. SDM yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender dan memiliki otoritas terkait dengan pembangunan pendidikan di sekolah dengan memberi kontribusi sangat kuat terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Preferensi stakeholders pendidikan di luar Institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memberi kontribusi sangat kuat dalam mendesak gender sebagai arus utama kebijakan pendidikan di sekolah, khususnya dari DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM maupun Pusat Studi gender yang bersinergi satu sama dengan lainnya sebagai kekuatan yang menekan policy maker dalam memformulasikan kebijakan pendidikan di sekolah yang responsif gender.

Kedua, *Capacity building* dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di sekolah, baik terhadap stakeholders pada tingkat internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan secara berjenjang dari top eksekutif hingga pelaksana di tingkat *grass root*.

Ketiga, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terbangunnya budaya organisasi atas dasar hubungan gender yang egaliter dapat digunakan sebagai pedoman bersikap, bertindak atau berperilaku antar antar anggota organisasi dalam mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di sekolah.

Keempat, pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan akan mampu membangun proses pembelajaran bersama antar stakeholders dan jejaringnya sehingga menumbuhkan sensitivitas gender yang akan akan memberi kontribusi terhadap masuknya perspektif gender pada kebijakan pendidikan di sekolah.

Sedangkan ciri-ciri sekolah berwawasan gender, antara lain : (1). Kepemimpinan dilakukan secara horisontal dan team work kooperatif yang ramah terhadap perbedaan. Selain itu, manajemen tidak menawarkan peran stereotipi gender sehingga menghalangi capaian target sekolah; (2). Pembagian peran atau posisi fleksibel tergantung pada kebutuhan, kesempatan, komitmen dan kualitas serta pembakuan peran / posisi secara ketat banyak menimbulkan masalah (stereotipi, subordinasi, marginalisasi, beban lebih, kekerasan; mekanisme pengambil keputusan seimbang dan memperhatikan qouta minim 30% dari perempuan; menghargai perbedaan gaya, cara kerja laki-laki dan perempuan harus dimaknai sebagai kekuatan selama mencapai target; budaya sekolah harus menghindari perilaku yang stereotipi, diskriminatif, merendahkan salah satu jenis kelamin dan ; manajemen yang ramah terhadap perempuan, bahan pajangan kantor, kalender, poster, screen komputer tidak boleh melecehkan salah satu jenis kelamin; mendorong dan membantu setiap individu untuk maju dan setara.

C. Indikator Sekolah Berwawasan Gender

Sekolah merupakan lembaga yang berperan penting untuk merubah pola pikir peserta didik termasuk perilaku –perilaku yang dianggap bias gender. Oleh karena itu, sekolah adil gender memegang peran dan

fungsi yang strategis dalam mempersiapkan peserta didik agar dapat mengembangkan multi intelegensianya secara optimal tanpa terkendala oleh nilai-nilai sosial budaya yang kadang bias gender. Hanya sebagai penegasan, yang dimaksud dengan sekolah berwawasan gender adalah suatu sekolah yang baik aspek akademik, sosial, aspek lingkungan fisiknya maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang baik kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Dengan demikian guru, orang tua, tokoh, anggota masyarakat di sekitarnya serta siswa laki-laki dan perempuan menyadari akan pentingnya dan oleh karena itu mempraktekkan tindakan-tindakan yang setara dan adil gender (Depdiknas, 2008: 5-6). Selain itu, sistem manajemen sekolah, kebijakan –kebijakan dan tindakan nyata juga mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang mungkin berbeda antara laki-laki dan perempuan. Aspek kurikulum, pembelajaran, metodologi pembelajaran, interaksi pembelajaran di kelas, dan proses manajemen pembelajaran juga berwawasan kesetaraan dan keadilan gender. (Depdiknas, 2008:6)

Beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan sekolah berwawasan gender adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembelajaran responsif gender.

Pembelajaran responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran responsif gender mengharuskan pendidik untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender melalui : proses perencanaan pembelajaran; interaksi belajar mengajar; pengelolaan kelas dan; valuasi hasil belajar. Pembelajaran harus dilakukan responsif gender karena pembelajaran merupakan proses internalisasi nilai tentang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Karena itu pembelajaran responsif gender harus dilakukan dengan memperhatikan : keadilan akses, partisipasi, kontrol, manfaat; menyadari perbedaan; pendidikan Androgini dan; meninggalkan mitos. Sedangkan indikator pembelajaran responsif gender antara lain:

Pertama, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh akses partisipasi dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar di sekolah, tanpa terpengaruh oleh pandangan stereotipe terhadap jenis kelamin tertentu. Misal : anak laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kesempatan untuk praktek membedah binatang pada mata pelajaran biologi, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kesempatan untuk buat puisi.

Kedua, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam belajar di sekolah, misalnya sama-sama dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sama –sama dapat sanksi apabila mereka terbukti melanggar aturan sekolah.

Ketiga, peserta didik laki –laki dan perempuan memiliki kesempatan dan cara efektif untuk berbagi pengalaman hidup yang cenderung berbeda. Misal: peserta didik perempuan dapat mendiskusikan bersama pengalaman pertama kali menstruasi atau peserta didik laki-laki dapat mendiskusikan bersama pengalaman mimpi basah.

Keempat, berkurangnya pola–pola dan perilaku sekolah yang dapat memarginalkan salah satu jenis kelamin, misalnya anak laki –laki dan perempuan bebas memilih pelajaran sesuai minat dan bakat tanpa dibatasi oleh jenis kelamin.

Kelima, peserta didik laki-laki dan perempuan yang memiliki kesulitan belajar memperoleh pelayanan yang baik dan bermutu dari tenaga pendidik.

Keenam, peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki pilihan peran yang beragam dibandingkan dengan peran-peran tradisional mereka tanpa hambatan budaya dalam kehidupan mereka melalui pembelajaran di sekolah.

Ketujuh, bahan ajar yang ada di sekolah seperti buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku bacaan, serta bahan dan alat peraga pengajaran terbebas dari materi yang memuat gender stereotype seperti: pembagian kegiatan domestik cenderung digambarkan dilakukan oleh perempuan, sedangkan

pekerjaan di sektor publik cenderung dilakukan oleh laki-laki (Sumber : Depdiknas, 2008, Modul 1 : Panduan Mewujudkan Manajemen Berbasis sekolah yang responsif gender)

2. Adanya perencanaan pembelajaran responsif gender

Pada pembelajaran responsif gender guru harus memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, pengelolaan kelas, maupun dalam evaluasi hasil belajar. Perencanaan pembelajaran yang responsif gender adalah rencana mengajar yang memperhitungkan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran adalah :a. materi atau konten pembelajaran apakah materi mengandung stereotip gender b. Metodologi dan pendekatan mengajar. Guru harus memilih metode belajar mengajar yang dapat memastikan partisipasi yang setara dan seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan; c. Kegiatan Pembelajaran. Rencana pembelajaran harus dapat menjamin agar semua siswa dapat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran tanpa kecuali baik laki-laki maupun perempuan.

3. Adanya penataan ruang Kelas yang responsif gender

Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. Guru yang inovatif perlu tetap mencari cara untuk mengelola tata letak ruang kelas untuk menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya partisipasi belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. Tata letak ruang kelas perlu memrespon kebutuhan khusus anak perempuan dan anak laki-laki. Hal tersebut mencakup hal-hal penting sebagai berikut :

- a. Tata letak ruang kelas yang mencampur anak laki-laki dan perempuan;
- b. Tata letak ruang kelas yang mampu mendorong partisipasi siswa laki-laki dan perempuan;
- c. Tata letak tempat duduk yang mendorong anak perempuan mau dan mampu menyampaikan pendapatnya dan menghilangkan rasa malu rendah diri;
- d. Tempat duduk di laboratorium memiliki ukuran dan bentuk yang nyaman untuk anak laki-laki maupun anak perempuan ;
- e. Gambar-gambar dan ilustrasi di dinding sekolah menggambarkan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan yang responsif gender.

4. Adanya Manajemen Sekolah responsif Gender

Pendekatan MBS yang berbasis kesetaraan gender ini mempunyai ciri dengan indikator sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah misal: kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah. Kesempatan ini harus terbuka lebar bagi guru perempuan maupun guru laki-laki. Dasar penentuan seseorang dapat atau tidak dapat mengendalikan sistem pendidikan di sekolah bukanlah jenis kelamin seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh kompetensinya;
- b. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam membina, mengarahkan dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut. Misal : kesamaan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kesamaan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pelatihan tersebut;
- c. Sekolah memberi penghargaan terhadap hasil unjuk kerja tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan berdasarkan atas kompetensi yang mereka miliki tanpa terkendala oleh hambatan kultural terkait peran yang mereka jalankan. Dengan demikian pemberian penghargaan bukanlah diberikan atas dasar jenis kelamin, tetapi lebih mengedepankan pada kompetensi dan

kemampuannya. Misal : seorang guru perempuan berhak mendapatkan penghargaan karena telah mengembangkan inovasi pembelajaran. Penghargaan ini juga terbuka luas bagi guru laki-laki yang memiliki kompetensi sama;

- d. Tersedia data terpilah menurut jenis kelamin di sekolah sebagai dasar informasi dalam melakukan perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi pendidikan responsif gender. Misal : data tentang jumlah siswa menurut jenis kelamin, data tentang siswa berprestasi menurut jenis kelamin, data tentang guru menurut kepangkatan;
- e. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menempati jabatan struktural dan atau jabatan fungsional di sekolah;
- f. Sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat diakses dan memenuhi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan

5. Adanya penggunaan bahasa yang responsif gender

Penggunaan bahasa yang salah dapat menyampaikan pesan yang negatif dan mengganggu pembelajaran. Sebagai contoh, apabila guru yang secara terus-menerus mengatakan pada seorang siswa “bahwa anak laki-laki lebih malas dan anak perempuan lebih rajin”, siswa tersebut mungkin menjadi percaya bahwa hal tersebut memang benar dan hal ini akan berdampak buruk pada kinerja akademiknya. Siswa tersebut mungkin tidak akan belajar maksimal mengingat semua usahanya akan dianggap sia-sia.

Bahasa juga dapat mendorong terjadinya ketidaksetaraan. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan di kelas seringkali merefleksikan dominasi siswa laki-laki di kelas dan melemahkan perempuan untuk memiliki posisi yang lebih rendah. Guru merefleksikan bias gender yang dimilikinya melalui bahasa yang sesuai kepercayaannya bahwa anak laki-laki tidak sepandai atau setekun anak perempuan, anak perempuan tidak seberani anak laki-laki dan sebagainya.

6. Adanya Interaksi Kelas yang responsif gender.

Interaksi kelas merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Dinamika yang terjadi dalam interaksi kelas memiliki dampak terhadap kualitas proses pembelajaran. Penyampaian materi oleh guru akan berpengaruh terhadap kompetensi, pengetahuan materi maupun inovasi-inovasi yang nantinya bisa diadopsi maupun dikembangkan oleh peserta didik laki-laki maupun perempuan. Dalam interaksi di ruang kelas, guru perlu menyadari bahwa siswa laki-laki dan perempuan membutuhkan perhatian yang berlainan. Pembagian peran dan tanggung jawab di kelas sangat berdampak pada proses interaksi mereka di kelas. Guru perlu mengupayakan tidak adanya dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk menciptakan interaksi kelas yang benar-benar menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Guru yang responsif gender adalah guru yang memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan penghargaan yang sama agar mampu mendorong setiap anak untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran, seperti menyampaikan pendapatnya. Guru perlu bersikap adil tidak hanya menyukai salah satu jenis kelamin saja. Perlakuan yang sama akan memberi kesan bahwa setiap peserta didik adalah berharga dan bernilai, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika guru memperlakukan setiap anak secara baik, akan memudahkan bagi anak untuk mendengarkan dan akibatnya menghargai satu sama lain. Hal ini merupakan dasar bagi pembentukan karakter peserta didik dalam rangka menghormati orang lain. Interaksi di ruang kelas yang responsif gender diharapkan mampu membuat siswa laki-laki dan perempuan tumbuh menjadi warga negara yang lebih baik, yang berani mengemukakan pendapat, serta menghormati dan menghargai orang lain.

Penutup

Pendidikan yang bermutu mengembangkan potensi diri setiap anak baik laki-laki dan perempuan untuk menjadi individu yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Pendidikan harus memperhatikan hak setiap anak baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan latar belakang anak. Pendidikan di sekolah memegang peran yang sangat strategis dalam mengembangkan multi intelegensia peserta didik. Pendidikan diharapkan mampu mewujudkan seluas-luasnya kesempatan pendidikan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sekolah berwawasan gender, ada beberapa komponen kunci yang saling mendukung, antara lain: kapasitas SDM yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender; budaya di sekolah yang mengepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan keadilan gender; proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan prakarsa nilai-nilai sosial dan budaya yang tidak stereotype terhadap salah satu jenis kelamin dan; adanya pendidikan di sekolah harus mampu mengembangkan perilaku androgini, di mana peserta didik mempunyai kemampuan mengadopsi nilai-nilai positif yang terkandung dalam sifat maskulin maupun feminim.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir M, 2005, Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Grha Guru.
- Depdiknas, 2008, Panduan Sekolah Berwawasan Gender, Jakarta : Depdiknas
- Fakih, Mansour, 1999, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Bab 2 dan 3)
- Ihromi, TO. (ed). 1995. Kajian Wanita dalam pembangunan Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009. kebijakan Publik Pro Gender. Surakarta : UNS Press
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2008. Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan gender Surakarta : UNS Press
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2010, Pendidikan Adil gender konsep dan aplikasi di sekolah, :UNS Press
- Parawansa, Khofifah Indar, 2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi : Pemikiran Tentang Keserasian Gender, Jakarta : LP3ES